

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Sejarah Pendidikan Multikultural

Istilah multikulturalisme mulai digunakan orang sekitar tahun 1950-an di Kanada untuk menggambarkan masyarakat Kanada di perkotaan yang multikultural dan multilingual. Namun demikian, multikulturalisme menjadi konsep yang menyebar dan dipandang penting bagi masyarakat majemuk dan kompleks di dunia, bahkan dikembangkan sebagai strategi integrasi kebudayaan melalui pendidikan multikultural. Istilah multikulturalisme tidak lain sebagai sebuah konsep pengakuan (*recognition*) suatu entitas budaya dominan terhadap keberadaan budaya lain yang minoritas (A. Ubaedillah & Abdul Rozak, 2012: 58).

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, strategi pendidikan multikultural sejak lama telah berkembang di Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Strategi ini adalah pengembangan dari studi interkultural dan multikulturalisme. Dalam perkembangannya, studi ini menjadi sebuah studi khusus tentang pendidikan multikultural yang pada awalnya bertujuan agar populasi mayoritas dapat bersikap toleran terhadap para imigran baru. Studi ini juga mempunyai tujuan politis sebagai alat kontrol sosial penguasa terhadap warganya, agar kondisi negara aman dan stabil (Montalto ; Gollnick dan Chinn dalam M. Ainul Yaqin, 2005: 23).

Namun dalam perkembangannya, tujuan politis ini menipis dan bahkan hilang sama sekali karena “ruh” dan “nafas” dari pendidikan multikultural ini adalah demokrasi, humanisme dan pluralisme yang anti terhadap adanya kontrol dan tekanan yang membatasi dan menghilangkan kebebasan manusia. Selanjutnya, pendidikan multikultural ini justru menjadi motor penggerak dalam menegakkan demokrasi, humanisme dan pluralisme yang dilakukan melalui sekolah, kampus dan institusi-institusi pendidikan lainnya.

Sejarah kelam yang panjang yang dialami negara-negara Eropa dan Amerika seperti kolonialisme, perang sipil di Amerika dan perang dunia I dan II, sebenarnya juga menjadi landasan utama kenapa pendidikan multikultural ini diaplikasikan di kedua negara besar tersebut (M. Ainul Yaqin, 2005: 24).

Akar sejarah multikulturalisme di Indonesia, menurut Muhaemin el-Ma'hady (2004) dapat dilacak secara historis, sedikitnya selama tiga dasawarsa kebijakan yang sentralistis dan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan dan memecahkan persoalan yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional dan damai. Kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam Negara-Bangsa, betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok.

Konteks global setelah tragedi September 11 dan invasi Amerika Serikat ke Irak serta hiruk pikuk politik identitas di dalam era reformasi menambah kompleknya persoalan keragaman dan antar kelompok di Indonesia.

Sistem politik Orde Baru yang sangat otoritarian dinilai hanya melahirkan monokulturalisme. Pada masa itu terjadi Jawanisasi dalam segala kehidupan, sehingga orang-orang di luar Jawa atau mereka yang tinggal di Jawa pun kehilangan identitas dirinya, sebab mereka menjadi tidak percaya diri bila tidak *njawani* (berpura-pura menjadi Jawa). Ketika Orde Baru tumbang, maka tuntutan untuk membangun identitas diri itu pun muncul dimana-mana. Jawaban atas tuntutan tersebut adalah melalui pendidikan multikultural (Darmaningtyas, 2006: 93).

2. Pendidikan Multikultural

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Menurut Langeveld, pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datang dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, yang dinamakan pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup

tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Hasbullah, 2011: 1-4).

Ahli antropologi Indonesia, Koentjaraningrat mendefinisikan pendidikan sebagai usaha untuk mengalihkan adat-istiadat dan seluruh kebudayaan dari generasi lama ke generasi baru. Definisi dengan nuansa filosofis terlihat pada rumusan J. Sudarminta yang memaknai pendidikan secara luas dan umum sebagai usaha sadar yang dilakukan pendidik melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk membantu anak didik mengalami proses pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi yang dewasa susila. Kata pendidikan sekurang-kurangnya mengandung empat pengertian: yaitu sebagai bentuk kegiatan, proses, buah, atau produk yang dihasilkan oleh proses tersebut, dan sebagai ilmu (Ngainun Naim & Achmad Sauqi, 2008: 30).

Menurut George F. Kneller dalam bukunya yang berjudul: *Foundations of Education*, pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan

dalam arti teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam artinya yang luas pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa (*mind*), watak (*character*), atau kemampuan fisik (*physical ability*) individu. Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses di mana masyarakat, melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lain), dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan-ketrampilan dari generasi ke generasi. (Dwi Siswoyo, dkk, 2008: 17-19).

Seperti dikemukakan di atas, memaknai pendidikan pada dasarnya dapat dilihat menggunakan dua cara pandang yaitu pendidikan dalam arti sempit dan pendidikan dalam arti yang luas. Pendidikan secara luas bukan sekedar kegiatan yang berlangsung di dalam lembaga formal seperti sekolah maupun perguruan tinggi. Pendidikan dilihat dan dimaknai sebagai proses sepanjang hidup tanpa mengenal batasan usia.

Pendidikan dalam arti yang luas tidak terpaku pada tempat pendidikan berlangsung. Dalam hal ini misalnya lembaga formal seperti sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan dapat berlangsung di mana saja dan dalam lingkungan apapun, tidak hanya berkisar pada lingkungan sekolah atau formal semata. Pendidikan dapat berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat atau sosial, dalam peribadatan atau agama, dalam kehidupan berpolitik, serta dalam lingkungan sosial lainnya. Hal ini

seperti tertera di dalam GBHN tahun 1978 dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah (Hasbullah, 2011: 63).

a. Multikulturalisme

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik (Choirul Mahfud, 2009: 75).

Multikulturalisme ternyata bukanlah suatu pengertian yang mudah. Di dalamnya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu “multi” yang berarti plural, “kulturalisme” berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi. Oleh sebab itu pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi (H.A.R. Tilaar, 2004: 82). Menurut Parsudi Suparlan (2004), multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan.

b. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural sekaligus juga untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka (M. Ainul Yaqin, 2005: 25).

Dalam bukunya *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content*, Hilda Hernandez mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Atau, dengan lain kata, bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (*plural*), baik latar belakang maupun basis sosio budaya yang melingkupinya (Choirul Mahfud, 2009: 176).

Baker (Setya Raharja, 2010: 29-30) menuturkan pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan di mana anak didik dilayani dengan pembelajaran dan pengalaman yang mengakui latar belakang budaya pada semua individu dan melalui mana mereka disiapkan untuk mengembangkan kehidupan dalam masyarakat yang lebih seimbang. Ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural harus diakui sebagai proses - bukan merupakan hal yang sederhana seperti program - yang komprehensif.

Selanjutnya Baker berpendapat mengenai perbedaan-perbedaan pada diri anak didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah atau asal-usul, ketidakmampuan fisik dan mental, kelompok umur, dan lain-lain. Melalui pendidikan multikultural ini anak didik diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya: sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa.

Menurut James A. Banks (Tilaar, 2004: 181) pendidikan multikultural adalah konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Dalam pendidikan

multikultural ada dimensi-dimensi yang harus diperhatikan. James Banks dalam Muhaemin El-Ma'hady (2004) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan yaitu : *content integration*, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu; *the knowledge construction process*, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin); *an equity paedagogy*, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial; *prejudice reduction*, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka; serta melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

Pada dasarnya, pendidikan multikultural dikembangkan untuk mengakomodasi keberagaman budaya yang dimiliki oleh anak didik baik secara kelompok maupun individual. Untuk lebih memahami dan mendalami konsep pendidikan multikultural ini, perlu kiranya diperhatikan beberapa prinsip dasar dalam penerapan pendidikan multikultural di sekolah. Prinsip-prinsip pendidikan multikultural tersebut secara rinci dijelaskan oleh Baker (Setya Raharja, 2010: 32) sebagai berikut.

- 1) Pendidikan multikultural adalah suatu proses, sehingga pengembangan pendidikan multikultural pada dasarnya dilakukan dalam periode waktu yang cukup lama.
- 2) Pengembangan pendekatan multikultural dalam pendidikan hendaknya komprehensif, lengkap, melibatkan semua partisipan dalam komunitas sekolah, serta dalam lingkungan yang kondusif dan mendukung.
- 3) Pelatihan dan pendidikan bagi para staf, guru-guru, orang tua murid, dan komunitas pimpinan merupakan hal yang esensial.
- 4) Pendidikan multikultural diawali dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh tentang latar belakang murid yang terlibat dalam proses.
- 5) Komponen pembelajaran pendidikan multikultural harus diintegrasikan secara teliti dalam kurikulum.

Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di setiap negara berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing negara. James A. Banks dalam Farida Hanum (2009: 30-31) mengemukakan empat pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum ataupun pembelajaran di sekolah yang bila dicermati relevan untuk diimplementasikan di sekolah di Indonesia, bahkan pendekatan pertama sudah biasa dilakukan, yaitu :

- 1) Pendekatan Kontribusi (*the contributions approach*). Level ini yang paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase

pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Ciri pendekatan kontribusi ini adalah dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku bangsa/etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang sampai saat ini yang dilakukan di Indonesia.

- 2) Pendekatan Aditif (*Aditive Approach*). Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan buku, modul atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif.
- 3) Pendekatan Transformasi (*the transformation approach*). Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pada pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama adalah hanya satu di antara perspektif darimana isu, masalah, dan konsep dipandang. Jadi suatu isu tidak hanya dilihat dari perspektif aliran utama yang mungkin dipaparkan pada materi pelajaran. Siswa boleh melihat dari perspektif yang lain. Banks menyebut ini proses *multiple*

acculturation sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar.

- 4) Pendekatan Aksi Sosial (*the social action approach*) mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan untuk kritik sosial dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan untuk kritik sosial dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh pendidikan politis, sekolah membantu mereka menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Dalam pendekatan ini pengajar adalah agen perubahan sosial yang meningkatkan nilai-nilai demokratis dan kekuatan siswa.

3. Nilai-nilai Keberagaman

a. Nilai sosial

Menurut Horton dan Hunt, nilai adalah gagasan tentang apakah pengalaman itu berarti atau tidak. Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu salah atau benar. Secara makro, bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai nasional yang digunakan untuk

mempersatukan bangsa yang majemuk ini. Nilai tersebut, diantaranya Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dalam hal ini nilai adalah konsep-konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik, patut, layak, pantas yang keberadaannya dicita-citakan, diinginkan, dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tujuan kehidupan bersama di dalam kelompok masyarakat tersebut, mulai dari unit kesatuan sosial terkecil hingga suku, bangsa, dan masyarakat internasional (Elly M. Setiadi & Usman Kolip, 2011: 199).

Sedangkan nilai-nilai sosial merupakan hal yang dituju oleh kehidupan sosial itu sendiri, sedangkan metode pencapaian nilai-nilai sosial tersebut adalah norma, sehingga fungsi norma sosial adalah sebagai petunjuk atau arah tentang cara untuk mencapai nilai (tujuan) tersebut. Dalam hal ini Notonegoro membedakan nilai menjadi tiga macam yaitu nilai material, meliputi berbagai konsepsi tentang segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Misalnya nilai tentang baik buruknya atau harga suatu benda yang diukur dengan alat ukur tertentu seperti uang, atau benda-benda berharga lainnya. Nilai vital, meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Nilai kerohanian yaitu meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia. Nilai kerohanian terbagi ke dalam nilai kebenaran, bersumber pada rasio (akal manusia). Nilai keindahan, bersumber pada unsur perasaan. Nilai moral,

bersumber pada unsur kehendak, terutama pada tingkah laku manusia antara penilaian perbuatan yang dianggap baik atau buruk, mulia atau hina menurut tatanan yang berlaku di dalam kelompok sosial tersebut. Nilai keagamaan, bersumber pada kitab suci (Elly M. Setiadi & Usman Kolip, 2011: 124-125).

b. Nilai-nilai Keberagaman

Nilai-nilai inti (*core values*) dari pendidikan multikultural menurut Prof. Bennett secara umum terbagi menjadi empat antara lain: *Pertama*, apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat. *Kedua*, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia. *Ketiga*, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia. *Keempat*, pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.

Berdasarkan nilai-nilai inti tersebut di atas maka dapat dirumuskan enam tujuan yang berkaitan dengan nilai-nilai inti tersebut, yaitu: *Pertama*, mengembangkan perspektif sejarah (etnohistorisitas) yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat. *Kedua*, memperkuat kesadaran budaya yang hidup di masyarakat. *Ketiga*, memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat. *Keempat*, membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka (*prejudice*). *Kelima*, mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi. *Keenam*, mengembangkan ketrampilan aksi sosial (*social action*) (H.A.R. Tilaar, 2003: 171-172).

Menurut Farida Hanum dan Setya Raharja (2011: 115) nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural berupa demokratis, humanisme, dan pluralisme. Adapun dalam pendidikan multikultural, proses nilai yang ditanamkan berupa cara hidup menghormati, tulus, toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural.

c. Nilai-nilai Keberagaman di Sekolah

Internalisasi nilai-nilai multikultural perlu diwujudkan sejak dini melalui pendidikan, setidaknya terdapat empat alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, pendidikan multikulturalisme dapat memberikan terobosan baru pembelajaran baru yang dapat mampu meningkatkan empati dan mengurangi prasangka siswa sehingga terciptanya warga negara yang mampu mengelola konflik tanpa kekerasan (*nonviolent*). Kedua, penerapan pendekatan dan strategi pembelajaran potensial dalam mengedepankan proses interaksi sosial memiliki afeksi yang kuat. Ketiga, model pembelajaran multikultural membantu pendidik dalam mengelola proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan kemampuan siswa dalam membangun kolaboratif dan memiliki komitmen nilai tinggi dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Keempat, memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam penyelesaian dan mengelola konflik bernuansa SARA yang timbul dalam masyarakat dengan cara

meningkatkan empati dan mengurangi prasangka. (Rahmi Fhonna, 2011: 35-36)

Dalam penerapannya, pendidikan multikultural bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran lain, sehingga dalam implementasinya perlu dilakukan oleh pendidik sebagai salah satu komponen pembelajaran. Karena itu, pendidikan multikultural tidak hanya menjadi tanggung jawab pendidik mata pelajaran tertentu, tetapi perlu diimplementasikan secara integral ke dalam berbagai materi pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran bersangkutan. Peran pendidik dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural sangat penting, di mana pendidik harus mampu mengelola dan mengorganisir isi, proses dan situasi kegiatan sekolah secara multikultural di mana setiap siswa dengan latar belakang yang berbeda berkesempatan untuk mengembangkan dirinya dan saling menghargai perbedaan yang tidak mungkin dihindari di lingkungan sekolah. Dengan kapasitas pendidik yang kreatif dan inovatif serta adanya dukungan dari seluruh komponen sekolah diharapkan akan muncul pemahaman dan afeksi siswa akan nilai-nilai multikultural yang dikembangkan seperti toleransi, solidaritas, musyawarah, dan pengungkapan diri (Rahmi Fhonna, 2011: 40-41).

Menurut Muthoharoh indikator keterlaksanaan nilai-nilai multikultural yang ada di sekolah dasar, adalah sebagai berikut (Imam Aji Subagyo, 2012: 16-17).

1) Nilai Inklusif (Terbuka)

Nilai ini memandang bahwa kebenaran yang dianut oleh suatu kelompok, dianut juga oleh kelompok lain. Nilai ini mengakui terhadap pluralisme dalam suatu komunitas atau kelompok sosial, menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas yang bermuara pada tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai kemungkinan unik yang ada.

2) Nilai Mendahulukan Dialog (Aktif)

Dengan dialog, pemahaman yang berbeda tentang suatu hal yang dimiliki masing-masing kelompok yang berbeda dapat saling diperdalam tanpa merugikan masing-masing pihak. Hasil dari mendahulukan dialog adalah hubungan erat, sikap saling memahami, menghargai, percaya, dan tolong menolong.

3) Nilai Kemanusiaan (Humanis)

Kemanusiaan manusia pada dasarnya adalah pengakuan akan pluralitas, heterogenitas, dan keragaman manusia itu sendiri. Keragaman itu bisa berupa ideologi, agama, paradigma, suku bangsa, pola pikir, kebutuhan, tingkat ekonomi, dan sebagainya.

4) Nilai Toleransi

Dalam hidup bermasyarakat, toleransi dipahami sebagai perwujudan mengakui dan menghormati hak-hak asasi

manusia. Kebebasan berkeyakinan dalam arti tidak adanya paksaan dalam hal agama, kebebasan berpikir atau berpendapat, kebebasan berkumpul, dan lain sebagainya.

5) Nilai Tolong Menolong

Sebagai makhluk sosial, manusia tak bisa hidup sendirian meski segalanya ia miliki. Harta benda berlimpah sehingga setiap saat apa yang ia mau dengan mudah dapat terpenuhi, tetapi ia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain dan kebahagiaan pun mungkin tak akan pernah ia rasakan.

6) Nilai Keadilan (Demokratis)

Keadilan merupakan sebuah istilah yang menyeluruh dalam segala bentuk, baik keadilan budaya, politik, maupun sosial. Keadilan sendiri merupakan bentuk bahwa setiap insan mendapatkan apa yang ia butuhkan, bukan apa yang ia inginkan.

7) Nilai Persamaan dan Persaudaraan Sebangsa maupun Antarbangsa

Dalam Islam, istilah persamaan dan persaudaraan itu dikenal dengan nama *ukhuwah*. Ada tiga jenis *ukhuwah* dalam kehidupan manusia, yaitu: *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan seagama), *ukhuwah wathaniyyah* (persaudaraan sebangsa), *ukhuwah bashariyah* (persaudaraan sesama manusia). Dari

konsep *ukhuwah* itu, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia baik yang berbeda suku, agama, bangsa, dan keyakinan adalah saudara. Karena antarmanusia adalah saudara, setiap manusia memiliki hak yang sama.

8) Berbaik Sangka

Memandang seseorang atau kelompok lain dengan melihat pada sisi positifnya dan dengan paradigma itu maka tidak akan ada antar satu kelompok dengan kelompok lain akan saling menyalahkan. Sehingga kerukunan dan kedamaian pun akan tercipta.

9) Cinta Tanah Air

Cinta tanah air dalam hal ini tidak bermakna sempit, bukan *chauvanisme* yang membangga-banggakan negerinya sendiri dan menghina orang lain, bukan pula memusuhi negara lain. Akan tetapi rasa kebangsaan yang lapang dan berperikemanusiaan yang mendorong untuk hidup rukun dan damai dengan bangsa-bangsa lain.

4. Sosialisasi Nilai-nilai Keberagaman

a. Sosialisasi

Individu dalam masyarakat akan mengalami proses sosialisasi agar ia dapat hidup dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat di mana individu itu berada. Sosialisasi merupakan proses transmisi kebudayaan antargenerasi, karena tanpa

sosialisasi masyarakat tidak dapat bertahan melebihi satu generasi. Syarat penting untuk berlangsungnya proses sosialisasi adalah interaksi sosial, karena tanpa interaksi sosial sosialisasi tidak mungkin berlangsung. Menurut David A. Goslin, sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya (R. Diniarti F. Soe'oed, 2004: 30). Sedangkan sosialisasi menurut Berger adalah proses di mana di dalamnya seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat (Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadhi, 2011: 181).

Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan dalam berbagai kelompok khusus. Sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan. Dalam proses sosialisasi individu belajar tingkah laku, kebiasaan serta pola-pola kebudayaan lainnya, juga ketrampilan-ketrampilan sosial seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Segala sesuatu yang dipelajari individu harus dipelajari dari anggota masyarakat lainnya, secara sadar apa yang diajarkan oleh orang tua, saudara-saudara, anggota keluarga lainnya dan di sekolah kebanyakan oleh gurunya. Seluruh proses sosialisasi berlangsung dalam interaksi individu dengan lingkungan (S. Nasution, 2004: 126).

Terdapat dua pola sosialisasi (Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadhi, 2011: 186) yaitu sosialisasi refresif (*refressive socialization*), menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lainnya menurut Jaeger seperti penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan, penekanan pada kepatuhan anak pada orang tua, penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, non verbal dan berisi perintah, penekanan titik berat sosialisasi pada orang tua dan pada keinginan orang tua, dan peran keluarga sebagai *significant other* (bagian diri terpenting). Sosialisasi partisipatoris (*participatory socialization*), merupakan pola yang di dalamnya anak diberi imbalan manakala berperilaku baik; hukuman dan imbalan bersifat simbolik; anak diberi kebebasan; penekanan diletakan pada interaksi; komunikasi bersifat lisan; anak menjadi pusat sosialisasi; keperluan anak dianggap penting; keluarga menjadi *generalized other* (penyamarataan dengan diri sendiri).

b. Sosialisasi Anak Didik

Anak sebagai objek penting dalam proses pembelajaran mempunyai kedudukan penting dalam proses sosialisasi. Di keluarga, anak berinteraksi dengan ayah, ibu dan anggota keluarga lain, di mana anak memperoleh pendidikan informal berupa kebiasaan. Keluarga sebagai salah satu dari pusat pendidikan bertugas membentuk kebiasaan-kebiasaan positif sebagai fondasi yang kuat dalam pendidikan informal. Anak selanjutnya bersosialisasi pada pendidikan formal di sekolah di mana mereka menuntut ilmu. Setelah masuk sekolah, anak diharapkan

dapat menyesuaikan diri dengan kondisi serta aturan-aturan sekolah yang berlaku. Di sekolah, anak berinteraksi dengan pendidik, staf karyawan, teman sejawat. Anak di sekolah memperoleh pendidikan formal berupa nilai-nilai, pengetahuan, ketrampilan dan sikap terhadap mata pelajaran. Dari proses sosialisasi di sekolah anak akan membentuk kepribadian untuk tekun dan rajin belajar, memiliki cita-cita, dan lain-lain.

Sebagai proses sosialisasi anak, sekolah memiliki peranan sebagai:

1) transmisi kebudayaan, termasuk norma-norma, nilai-nilai dan informasi melalui pengajaran secara langsung, misalnya dengan sifat-sifat warga negara yang baik; 2) mengadakan kumpulan sosial, seperti perkumpulan sekolah, pramuka, olah raga dan sebagainya yang memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mempelajari dan mempraktikkan berbagai keterampilan sosial; 3) memperkenalkan anak dengan tokoh teladan, dalam hal ini pendidik (guru) dan pemimpin sekolah memegang peranan yang penting; dan 4) menggunakan tindakan positif, seperti pujian, hadiah, dan sebagainya. Tindakan negatif seperti hukuman, celaan, dan lain-lain. Untuk mengharuskan murid mengikuti kelakuan yang layak dalam bimbingan sosial.

Proses sosialisasi di sekolah pada dasarnya tidak berbeda dengan proses sosialisasi di masyarakat dan di keluarga, yakni menanamkan dan mewariskan kebudayaan kepada anak didik. Dalam lembaga pendidikan akan terdapat berbagai karakter anak didik sesuai dengan keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat serta kedudukan anak dalam

keluarga. Perbedaan karakter individu tersebut, sedapat mungkin dapat diakomodasi dengan suatu sistem yang utuh dan integral yang dikenal dengan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan norma yang sedapat mungkin ditaati oleh setiap warga sekolah termasuk anak didik tanpa membedakan status dan golongan sosial anak didik (Abdullah Idi, 2011: 104-110).

c. Agen atau Media Sosialisasi

Dalam sosialisasi terdapat beberapa agen yang dipandang berperan dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial, dan harapan-harapan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat (Damsar, 2011: 69-70). Menurut Abdullah Idi (2011: 112-113), dalam sosialisasi anak didik terdapat sejumlah media atau agen sosialisasi, yakni :

- 1) keluarga, yang merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia adalah anggota keluarga. Fungsi sosialisasi menunjukkan pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkap-lengkapunya dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka kelak;

- 2) teman sepermainan dan sekolah, yang merupakan lingkungan sosial kedua bagi anak setelah keluarga, dalam kelompok ini anak akan menemukan berbagai nilai dan norma yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam keluarga. Melalui lingkungan sekolah dan teman sebaya anak mulai mengenal harga diri, citra diri, dan hasrat pribadi;
- 3) lingkungan kerja, merupakan proses sosialisasi lanjutan. Tempat kerja bagi seseorang berarti mulai berorganisasi secara nyata dalam suatu sistem. Sejumlah hal yang perlu dipelajari dalam lingkungan kerja, misalnya bagaimana menyelesaikan pekerjaan, bagaimana bekerja sama dengan bagian lain, dan bagaimana beradaptasi dengan rekan kerja; dan
- 4) media massa, merupakan sarana dalam proses sosialisasi karena media banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar.

B. Kajian Teori

1. Teori Interaksionisme Simbolis George Herbert Mead.

Kajian teori yang berhubungan dengan penanaman nilai-nilai multikultural pada sekolah dasar ini yaitu interaksionisme simbolis di mana di dalamnya terdapat sosialisasi sebagai salah satu bentuk interaksi sosial. Prinsip dasar teori interaksionisme simbolis yaitu :

- a. Tidak seperti binatang yang lebih rendah, manusia ditopang oleh kemampuan berpikir.
- b. Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial.
- c. Dalam interaksi sosial orang mempelajari makna dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir tersebut.
- d. Makna dan simbol memungkinkan orang melakukan tindakan dan interaksi khas manusia.
- e. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan tafsir mereka terhadap situasi tertentu.
- f. Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini, sebagian karena kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan mereka memikirkan tindakan yang mungkin dilakukan, menjajaki keunggulan dan kelemahan relatif mereka, dan selanjutnya memilih.

- g. Jalinan pola tindakan dengan interaksi ini kemudian menciptakan kelompok dan masyarakat.

Teori interaksionisme simbolis menjabarkan bahwa hampir seluruh pikiran terkait dengan setiap aspek lain interaksionisme simbolis termasuk sosialisasi, makna, simbol, diri, interaksi, dan bahkan masyarakat. Orang hanya memiliki kemampuan berpikir secara umum. Kapasitas ini harus dibentuk dan dipoles dalam proses interaksi sosial. Pandangan semacam itu menyebabkan interaksionis simbolis memusatkan perhatian pada bentuk interaksi sosial spesifik –*sosialisasi*. Kemampuan berpikir manusia berkembang pada awal sosialisasi kanak-kanak dan dipoles selama sosialisasi masa dewasa. Bagi interaksionis simbolis, sosiolog konvensional cenderung melihat sosialisasi sekedar sebagai proses mempelajari berbagai hal yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat (misalnya, kebudayaan, ekspektasi peran). Bagi interaksionis simbolis, sosialisasi adalah proses dinamis yang memungkinkan orang mengembangkan kemampuan berpikir, tumbuh secara manusiawi. Lebih jauh lagi, sosialisasi tidak sekedar proses satu arah di mana aktor hanya menerima informasi, namun satu proses dinamis di mana aktor membangun dan memanfaatkan informasi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008: 393-394).

Menurut Mead, orang tak hanya menyadari orang lain tetapi juga mampu menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian orang tidak hanya

berinteraksi dengan orang lain, tetapi secara simbolis dia juga berinteraksi dengan dirinya sendiri. *Interaksi-simbolis* dilakukan dengan menggunakan bahasa, sebagai satu-satunya simbol yang terpenting, dan melalui isyarat (Poloma, 2004: 257).

Penanaman nilai-nilai multikultural yang dilakukan di sekolah dasar tersebut merupakan sarana sosialisasi nilai-nilai keberagaman sedini mungkin pada siswa, agar mereka dapat menjabarkan dan memaknai keberagaman yang ada secara bijak sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditanamkan di sekolah. Dalam sosialisasi nilai-nilai keberagaman, siswa bukan sebagai objek namun diberikan stimulus atau rangsangan agar siswa berpikir secara kritis. Penanaman nilai-nilai multikultural ini dilakukan melalui interaksi sosial yang terjadi antara pendidik dengan siswa saat proses belajar mengajar berlangsung, di mana di dalamnya terdapat makna untuk disampaikan kepada anak didik (siswa) dalam hal ini nilai-nilai keberagaman.

C. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Aji Subagyo mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Pengaruh Keterlaksanaan Nilai-Nilai Multikultural terhadap Sikap Pluralis Siswa SD Se-Kecamatan Umbulharjo. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penanaman nilai-nilai multikultural yang dilakukan di sekolah dasar, namun pada penelitian tersebut lebih fokus pada pengaruh yang ditimbulkan dari penanaman

nilai-nilai multikultural pada sikap pluralis siswa dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian tersebut menjabarkan keterlaksanaan nilai-nilai multikultural di sekolah dasar berpengaruh secara signifikan terhadap sikap pluralis siswa SD se-Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Pengaruh yang diberikan oleh lembaga pendidikan sebesar 27,2484%, sedangkan sisanya sebesar 72,7516% dipengaruhi oleh faktor pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, faktor emosional. Sedangkan peneliti lebih membahas pada bagaimana penanaman nilai-nilai multikultural dilakukan di sekolah dasar dalam hal ini SD Tumbuh 2 Yogyakarta dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif tanpa mengukur dampaknya terhadap sikap pluralis siswa. Penelitian Imam Aji Subagyo memberi manfaat bagi peneliti dengan penggambaran mengenai nilai-nilai multikultural yang ditanamkan pada siswa sekolah dasar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto mahasiswa program studi Pendidikan Guru Raudlatul Athfal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Pendidikan Multikultural pada Anak Usia Dini di TK Harapan Bangsa Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu pada tema yang akan dikaji yaitu pendidikan multikultural pada usia dini, namun peneliti melakukannya pada siswa sekolah dasar. Di samping itu, peneliti tidak membahas mendalam mengenai dampak pendidikan multikultural pada perilaku anak. Hasil penelitian Hariyanto meliputi beberapa temuan

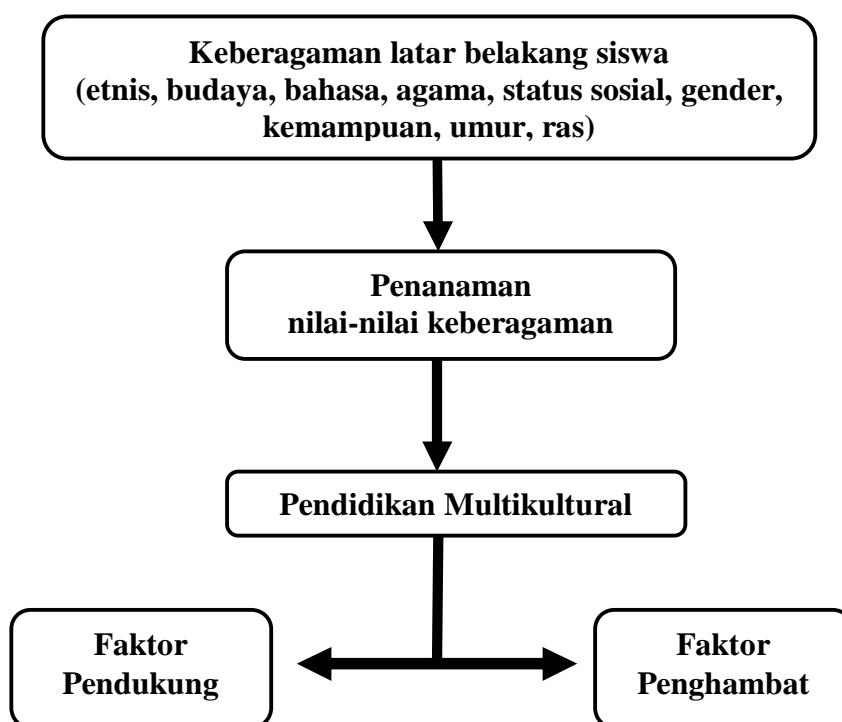
seperti penyelenggaraan pendidikan multikultural yang dilakukan melalui pendekatan orientasi kurikulum, pendekatan pembelajaran, fokus pembinaan perilaku dan sikap anak, serta dampak pendidikan multikultural terhadap perilaku anak TK Harapan Bangsa. Penelitian tersebut memberikan manfaat bagi peneliti bagaimana pendidikan multikultural dilakukan pada usia yang lebih dini serta penggambaran peran sekolah sebagai agen sosialisasi pendidikan.

D. Kerangka Pikir

Keberagaman suku bangsa, bahasa, etnis, ras, bahasa, agama, adat istiadat, terbentang dari pulau Sumatra hingga Papua merupakan anugrah bangsa Indonesia sebagai kekayaan budaya yang tidak dimiliki negara lain. Namun, jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan perselisihan dan konflik yang disebabkan perbedaan kebudayaan yang ada. Diperlukan upaya meminimalisir terjadinya konflik akibat perbedaan kebudayaan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, salah satunya melalui penanaman nilai-nilai keberagaman.

Keberagaman budaya yang ada di dalam masyarakat, juga tergambar pada lingkungan sekolah. Siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda (etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, ras) berkumpul bersama dalam lingkungan sekolah. Keberagaman tersebut memunculkan gagasan mengenai pendidikan multikultural guna meminimalisir perselisihan akibat perbedaan budaya dan sosial.

Penanaman nilai-nilai keberagaman di sekolah sebaiknya dilakukan sedini mungkin pada jenjang sekolah dasar. Hal ini bertujuan agar pendidikan multikultural benar-benar tertanam kuat dalam diri individu, sehingga kelak mereka dewasa, keberagaman di lingkungan mereka tidak menjadi masalah dan dapat disikapi dengan bijak. Pendidikan multikultural pada pelaksanaannya memerlukan pengembangan lebih lanjut dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat terlaksananya penanaman nilai-nilai keberagaman tersebut. Peneliti dalam hal ini akan mengkaji lebih dalam mengenai sosialisasi nilai-nilai keberagaman di SD Tumbuh 2 Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambat.



Bagan 1. Kerangka Pikir